

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh berbagai lapisan dan golongan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia pada periode perjuangan kemerdekaan tahun 1945–1949 merupakan periode perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih cita-cita agar dapat hidup secara layak sebagai bangsa yang merdeka. Dalam periode itu, peran masyarakat di setiap daerah sangat berpengaruh apalagi banyak yang dirugikan dan juga mengalami penderitaan yang berat untuk mempertahankan kemerdekaan dan mencapai sebuah persatuan nasional. Perlawanan oleh hampir seluruh lapisan rakyat Aceh periode 1945-1949 yang berhasil secara gemilang menghadapi para penjajah dapat dikatakan sebagai suatu gerakan mempertahankan kemerdekaan.

Keberhasilan dalam mempertahankan kemerdekaan di Indonesia pada dasarnya bukanlah semata-mata hasil dari kelompok tertentu. Akan tetapi, merupakan usaha dan peran serta masyarakat secara luas yang diwujudkan dalam segala bentuk kegiatan yang merupakan modal terjadinya perubahan. Dalam peristiwa ini, masyarakat Aceh secara bersama-sama melawan para sekutu dan kenyataannya melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia lahir sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Aceh secara yuridis historis merupakan salah satu daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan status “keresidenan” di dalam provinsi Sumatera. Bersamaan dengan pembentukan keresidenan Aceh

berdasarkan surat ketetapan Gubernur Sumatera Utara Nomor I/ X tanggal 3 oktober 1945 maka diangkatlah Teuku Nyak Arief sebagai Residen Aceh. (Ismail, 1994 : 3).

Kedudukan daerah Aceh sebagai bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, keresidenan Aceh pada 1947 berada di bawah daerah administratif Sumatera Utara. Sehubungan dengan adanya agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia, maka keresidenan Aceh, dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (PERPPU) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1959, status Provinsi Aceh berubah kembali menjadi keresidenan sebagaimana pada awal kemerdekaan. (Lembaga Informasi Nasional : 3).

Pada masa perang kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945-1949, provinsi aceh memang jauh lebih aman dibandingkan dengan daerah Nusantara lainnya. Hal ini dikarenakan Belanda tidak berani memasuki Aceh. Trauma masa lalu yang melibatkan Belanda berperang selama 80 tahun dengan aceh merupakan pengalaman pahit yang hampir-hampir saja membuat Netherland bangkrut. Menurut perkiraan para pemimpin Republik Indonesia di Aceh dalam perang Kemerdekaan, Belanda akan memasuki Aceh, setelah daerah-daerah lainnya diduduki dan dikuasainya. Belanda sampai melancarkan dua kali agresi militer terhadap Republik Indonesia tanggal 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948, namun Republik tetap bertahan. (Jakobi, 1992 : 65).

Dalam kaitan ini peranan Aceh sangat dominan dalam menangkis dan menafikan radio Batavia dan radio Hilversium, yang menyatakan Republik sudah

mati dengan ditangkapnya Soekarno-Hatta dan didudukinya ibukota negara Yogyakarta. Satu-satunya wilayah Republik Indonesia yang masih utuh, tidak dapat diduduki Belanda adalah Aceh. Radio Perjuangan “Rimba Raya” di Takengon, terus menayangkan perjuangan Republik ke forum internasional. (Jakobi, 1998 : 275)

Bireuen merupakan salah satu daerah di Aceh yang memiliki peran sangat berpengaruh pada masa mempertahankan kemerdekaan. Dikarenakan Bireuen merupakan daerah strategis yang terletak di persimpangan jalan Medan-Kuta Raja (sekarang Banda Aceh)-Takengon serta berperan sebagai pusat kegiatan kemiliteran dan Barisan Rakyat Bersenjata. Sejumlah senjata berat juga dipusatkan di Bireuen. Pada tanggal 18 November 1945 T. Hamzah mewakili pimpinan Wakil Markas Daerah III API (Angkatan Pemuda Indonesia) di Bireuen menerima penyerahan 320 pucuk senjata dari Daitaityo Ibi Hara dalam upacara militer yang disaksikan pasukan API dan pimpinan kelasykaran setempat. (Jakobi, 1992 : 51)

Hal yang menarik dari peristiwa perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan di Bireuen yaitu terjadinya realisasi pengiriman senjata berat ke front Medan Area yang dilakukan Komando Resimen II di Bireuen atas perintah Panglima Divisi Gajah-I, Kolonel Husin Jusuf. Pengiriman ini dimulai permulaan bulan Desember 1946. Bung Karno berkunjung ke Aceh tahun 1948, Bireuen juga tidak ketinggalan mendapat tempat di hati Presiden Soekarno untuk disinggahi dan memberikan amanatnya kepada rakyat. Selain itu, Bireuen pernah menjadi tempat pimpinan Divisi TKR/TRI dalam revolusi fisik, telah menata dan

mempersiapkan perang gerilya jangka panjang, jika Belanda sampai berani menjejakkan kakinya ke daerah Aceh. (Jakobi : 1992).

Bireuen juga pernah menjadi ibukota RI yang ketiga selama seminggu, setelah Yogyakarta jatuh ketangan penjajah dalam agresi Belanda. (Ensiklopedi Kab.Bireuen : 38). Akhirnya pada tahun 1949 para pimpinan militer di Bireuen, yang telah mengelola dan mempersiapkan seluruh aparat yang akan diterjunkan dalam perang gerilya jangka panjang itu, melahirkan sebuah perjanjian yang disebut sebagai perjanjian “Bireuen Agreement”.

Selama masa perjuangan kemerdekaan, muncul pemimpin-pemimpin perjuangan yang mampu memobilisasi kekuatan masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap sekutu. Pemimpin-pemimpin ini ada yang berasal dari daerah setempat atau pemimpin lokal, namun ada juga yang berasal dari luar daerah. Karena peristiwa itu merupakan rangkaian historis, maka kondisi-kondisi yang mendukung terjadinya suatu peristiwa perlu dianalisis.

Bertolak dari latar belakang peristiwa tersebut, maka terdapat sejumlah permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini. Dan penulis merangkumnya di dalam Bireuen Pada Masa Mempertahankan Kemerdekaan (1945-1949).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bireuen pada masa proklamasi kemerdekaan
2. Peristiwa penyerbuan tangsi dan pertempuran merebut senjata Jepang di Bireuen
3. RIMA dalam pertempuran Medan Area
4. Perjanjian Bireuen Agreement

1.3. Pembatasan Masalah

Melihat luasnya ruang lingkup yang akan dibahas, sehingga dalam hal ini mengharuskan peneliti untuk membatasi masalah dalam penelitian ini agar lebih terarah. Dengan demikian apa yang hendak dicapai terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti membatasi masalah pada : “Bireuen Pada Masa Mempertahankan Kemerdekaan 1945-1949”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan Bireuen pada masa proklamasi kemerdekaan ?
2. Bagaimana Peristiwa penyerbuan tangsi dan pertempuran merebut senjata Jepang di Bireuen?
3. Apa peranan RIMA dalam pertempuran Medan Area ?
4. Mengapa terbentuknya perjanjian Bireuen Agreement ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis keadaan Bireuen pada masa proklamasi kemerdekaan
2. Untuk menganalisis peristiwa penyerbuan tangsi dan pertempuran merebut senjata Jepang di Bireuen
3. Untuk mengetahui mengenai peranan RIMA dalam pertempuran Medan Area
4. Untuk mengetahui latar belakang terbentuknya Bireuen Agreement

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wawasan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai sejarah Bireuen yang hampir punah karena minimnya literatur sejarah mengenai sejarah Bireuen itu sendiri.
2. Sebagai pengalaman kepada peneliti dalam memenuhi tugas kuliah.
3. Sebagai informasi dan tinjauan pustaka kepada penelitian yang relevan di masa yang akan datang.
4. Untuk menambah khasanah kepustakaan, khususnya di Universitas Negeri Medan.

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berfikir dalam mengkaji sejarah yang banyak menuai kontroversi.